

## Konflik Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

### APA ITU?

Orang-orang memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda atas sumber daya - sumber daya seperti hutan, air, padang rumput, dan lahan, dan ingin mengelolanya dengan cara yang berbeda. Dengan mengetahui kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda ini dapat membantu menyampaikan cara pengelolaan yang berhasil sehingga setiap orang mendapatkan manfaat sebesar mungkin. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menghasilkan konflik apabila :

- Terjadi persaingan atas barang-barang materi, manfaat-manfaat ekonomi, kepemilikan atau kekuasaan;
- Pihak-pihak terlibat merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi;
- Pihak-pihak terlibat merasa bahwa nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka terancam.

KALAU BELUM ADA PROYEK PEMBANGUNAN, MAKA SEOLAH-OLAH TIDAK ADA MASALAH! TAPI, KALAU SUDAH ADA PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN SEPERTI PERKEBUNAN SAWIT, PERTAMBANGAN, HTI, ATAU TRANSMIGRASI, BARULAH MASALAHNYA KELIHATAN!



Adopted from : HuMA

Kadang-kadang lebih baik untuk memantau suatu konflik dari pada ikut campur di dalamnya. Konflik semacam ini merupakan persoalan, tetapi tidak akan menjadi perselisihan dan tidak berbahaya. Di lain

waktu, jika suatu konflik diabaikan atau usaha-usaha untuk mengelolanya gagal, konflik dapat berkembang menjadi suatu perselisihan atau bentuk-bentuk konfrontasi lainnya. Suatu perselisihan terjadi jika suatu konflik tentang suatu isu atau kejadian tertentu menjadi terbuka dan memasyarakat. Suatu perselisihan dapat merupakan sebuah perkelahian, sebuah seruan/tuntutan kepada pihak berwajib, atau sebuah kasus pengadilan. Perbedaan antara perselisihan-perselisihan dan konflik adalah hal yang penting. Semua perselisihan mencerminkan konflik tetapi tidak semua konflik berkembang menjadi perselisihan-perselisihan. Beberapa konflik dapat berkembang dengan cepat menjadi perselisihan-perselisihan. Sedangkan yang lainnya dapat terpendam dalam waktu yang lama sampai dipicu atau diperburuk oleh sesuatu yang baru, seperti misalnya proyek-proyek pembangunan atau datangnya kepentingan dari luar.

Konflik sumber daya alam berbasis masyarakat dapat terjadi pada tingkat lokal, tetapi seringkali melibatkan pelaku-pelaku regional, nasional, atau bahkan global. Mulai dari konflik di antara orang per orang atas penggunaan lahan sampai pada konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berselisih tentang kendali atas tanah dan hutan atau kelompok-kelompok nelayan yang tidak sepekat mengenai peralatan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Konflik pada tingkat masyarakat mungkin melibatkan badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan domestik dan multi-nasional, politisi-politisi, badan-badan pembangunan internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Suatu perselisihan dapat pula terjadi pada tingkat-tingkat yang berbeda. Pada satu tingkat, persoalan utamanya dapat berupa akses ke atau kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh orang-orang. Pada tingkat yang lain, perselisihan dapat terkait dengan hal-hal yang mempunyai akar yang lebih dalam, seperti pengakuan, hak-hak, identitas atau kemampuan untuk berpartisipasi.

Intensitas konflik juga sangat bervariasi, mulai dari kebingungan dan frustrasi di antara anggota suatu masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang dikomunikasikan, sampai pada kekerasan antara berbagai kelompok tentang kepemilikan, hak-hak dan tanggung jawab atas sumber daya (Bukles, 1999).

Seperti yang diperlihatkan dalam pembahasan ini, konflik dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat seringkali sangat rumit. Biasanya ada banyak penyebab dan isu yang saling terkait, yang mempersulit pengenalan (identifikasi) isu-isu kunci di dalam konflik tersebut.

Terkadang akan membantu bila kita memikirkan tiga unsur yang ada dalam konflik sebagai berikut :

- **Orang-Orang:** bagaimana orang-orang berpikir tentang sesuatu hal dan hubungannya dengan suatu konflik; perasaan-perasaan, emosi-emosi dan persepsi-persepsi mereka dan orang-orang lain yang terlibat tentang masalah-masalah; serta bagaimana hal-hal tersebut berhubungan satu sama lain dan dengan sumber daya dalam usaha untuk menjamin penghidupan yang berkelanjutan;
- **Proses:** cara membuat keputusan-keputusan, dan bagaimana perasaan orang-orang mengenainya. Proses pengambilan keputusan Bebas didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent*) seringkali diabaikan sebagai penyebab utama suatu konflik. Walaupun demikian, kemarahan, perasaan, diperlakukan tidak adil, dan perasaan ketidakberdayaan seringkali berakar pada hal ini (proses);
- **Masalah-Masalah:** isu-isu spesifik dan perbedaan-perbedaan di antara orang-orang, kelompok-kelompok dan badan-badan yang terlibat. Hal ini seringkali mencakup nilai-nilai yang berbeda, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan, atau perbedaan-perbedaan yang tajam mengenai penggunaan, penyebaran atau aksesibilitas terhadap sumber daya-sumber daya yang langka. Hal-hal tersebut seringkali dirujuk sebagai "*akar penyebab*" konflik.

## BAGAIMANA KONFLIK SDA BERLANGSUNG?

### 1. Persaingan yang meningkat dalam pemanfaatan sumber daya alam

Sumber daya alam semakin menjadi obyek persaingan yang ketat. Pada kebanyakan kasus, ada

beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yang mencakup :

- Perubahan demografis (misalnya pertumbuhan populasi penduduk, migrasi, dan urbanisasi penduduk);
- Tekanan pasar (misalnya meningkatnya komersialisasi, intensifikasi, dan swastanisasi ekonomi lokal, semakin terintegrasinya ekonomi nasional dan global, reformasi ekonomi);
- Perubahan-perubahan lingkungan yang memaksa orang-orang untuk mengubah strategi-strategi kehidupan mereka (misalnya banjir, kekeringan yang berulang-ulang, perubahan aliran sungai, perubahan migrasi satwa liar).



Proses mediasi konflik antara PT. Citra Riau Sarana (Wilmar Group) dengan masyarakat adat Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Sumber: Scale up)

Hal-hal ini dapat memaksa orang-orang untuk melampaui batas-batas pemanenan yang berkelanjutan dari sumber daya yang dapat diperbaharui (hutan, aliran air, padang rumput, sumber daya laut, satwa liar, dan tanah pertanian). Di daerah-daerah di mana jumlah orang meningkat, sumber daya yang tersedia perlu dibagi di antara para pengguna yang lebih banyak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Para pengguna ini mencakup mulai dari para petani yang mencari akses ke lahan pertanian, peternak yang membutuhkan sumber daya padang rumput untuk ternaknya, dan penduduk kota yang membutuhkan daging, ikan, dan biji-bijian yang lebih banyak.

Jaminan atas akses ke sumber daya dapat menjadi perhatian utama orang-orang bila sumber daya-sumber daya tersebut langka. Sebuah contoh penting adalah kelangkaan air di daerah-daerah kering (*arid*) atau semi kering (*semi-arid*). Karena



air bersih sangat dibutuhkan bagi kehidupan, sedangkan air tidak dapat dibuat atau ditanam, maka akses ke air dapat menjadi objek suatu perselisihan. Meskipun

demikian, persaingan yang meningkat tidak selalu menjadi satu-satunya penyebab konflik. Ada empat kondisi penting yang mempengaruhi bagaimana akses ke sumber daya menjadi diperebutkan, yaitu:

- Kelangkaan sumberdaya alam;
- Sejauh mana suatu pasokan dibagi oleh dua kelompok atau lebih;
- Kekuasaan relatif dari kelompok-kelompok tersebut;
- Tingkat ketergantungan atas sumber daya tertentu, atau kemudahan akses ke sumber daya-sumber daya alternatif.

Tentu saja meningkatnya permintaan akan sumber daya dapat menghasilkan tanggapan-tanggapan lain selain konflik. Misalnya, keadaan tersebut dapat mendorong dilakukannya intensifikasi pertanian (penggunaan pupuk, pembuatan teras, irigasi, budidaya tanaman campuran, pemeliharaan ternak dalam kandang, penanaman pohon, dan lain-lain), meningkatnya ketergantungan pada sumber pendapatan yang berasal dari sektor nonpertanian, atau peningkatan komersialisasi produksi. Adaptasi-adaptasi baru ini mungkin pada gilirannya dapat menghasilkan konflik sejalan dengan berubahnya pola penggunaan sumber daya.

## 2. Penyebab-penyebab struktural dari konflik

Organisasi-organisasi dan pola-pola yang sudah mapan menentukan bagaimana hukum berjalan, bagaimana pendidikan dan pelayanan kesehatan disediakan, dan bagaimana wanita dan pria, tua dan muda hidup sebagai keluarga dan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat digambarkan sebagai cara di mana suatu masyarakat terstruktur dan terorganisasi. Konflik sumber daya alam seringkali didukung oleh struktur ini.

Suatu konflik dapat melibatkan satu persoalan, contohnya suatu perselisihan batas antara dua desa. Hal ini dapat diselesaikan oleh orang-orang setempat dengan menggunakan hukum adat atau mediasi oleh pemerintah daerah. Tetapi jika seseorang ingin menggunakan peraturan dan hukum negara, maka konflik tersebut menjadi lebih rumit. Suatu konflik struktural dapat terjadi karena hukum adat dan undang-undang negara diatur dengan cara yang berbeda-beda, yaitu yang satu bersifat lokal dan

yang lain bersifat nasional. Peraturan negara biasanya lebih kuat dan karenanya konflik tersebut dapat bergeser dari perselisihan batas menjadi suatu perselisihan mengenai hak-hak dan identitas masyarakat.

Lebih jauh lagi, persoalan-persoalan struktural seperti ini seringkali berakar pada kondisi-kondisi yang sudah ada sangat lama, seperti cara bagaimana kesejahteraan diwujudkan atau kekuasaan diciptakan, didistribusikan atau diawasi di dalam masyarakat. Demikian pula batasan-batasan sosial, politik, ekonomi atau hukum di dalam suatu masyarakat mungkin dirasakan sebagai tidak adil, tidak efektif atau eksklusif. Hal ini menyulitkan penyelesaian masalah. Konflik struktural seringkali tidak muncul sampai kemudian dibangkitkan oleh faktor-faktor lain. Konflik yang terjadi antara sistem-sistem pengaturan lahan menurut adat dengan sistem yang resmi (menurut undang-undang) sering menjadi kekhawatiran yang besar. Bahkan jika sebagian besar penduduk pedesaan memperoleh hak-hak atas lahan melalui cara adat, pengaturan-pengaturan kepemilikan lahan lokal seringkali berada pada posisi tidak pasti dan tidak terjamin di dalam kerangka kebijaksanaan nasional. Hak adat atas lahan seringkali tidak jelas (walaupun mereka diakui secara hukum), sehingga konflik antara hukum negara dan adat mungkin akan terus berlangsung. Pihak-pihak berwenang yang menggunakan peraturan-peraturan yang berbeda dapat membuat keputusan-keputusan yang saling bertentangan, di mana yang satu membuat keputusan menurut hukum adat sedangkan yang lainnya menggunakan hukum Negara (undang-undang).

Ketidakadilan yang besar (baik kenyataan maupun anggapan) dapat menimbulkan konflik dalam penggunaan atau pengawasan sumber daya alam. Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang terpinggirkan mungkin bersaing untuk mendapatkan atau memastikan hak-hak mereka, sedangkan kelompok-kelompok yang istimewa merasa perlu untuk mempertahankan hak-hak yang telah mereka miliki. Kadang-kadang, kelompok-kelompok minoritas bersaing untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Dalam hal ini, perjuangan untuk mendapatkan akses ke sumber daya akhirnya bertalian dengan usaha untuk mendapatkan pengakuan identitas, status, dan hak-hak politik.



### 3. Perubahan sosial-ekonomi yang menimbulkan konflik

Ketika masyarakat dan ekonomi mengalami perubahan, tidak mengherankan bila kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan pengguna sumber daya alam juga berubah. Pembangunan ekonomi seringkali meningkatkan tekanan pada sumber daya alam, dan hal ini dapat memicu konflik atau membuat konflik yang telah ada semakin memburuk.

Berikut adalah beberapa contoh:

- Pengenalan teknologi baru dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada kesinambungan dari pemanfaatan sumber daya. Bila dikelola dengan baik, teknologi-teknologi seperti pupuk buatan, mekanisasi pertanian atau irigasi yang permanen dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi bila salah dikelola, mereka dapat menurunkan kapasitas sumber daya yang terbaharukan untuk memulihkan diri, meningkatkan kelangkaan sumber daya, dan dalam jangka panjang mengancam kehidupan para pengguna yang tergantung pada sumber daya;
- Komersialisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki bersama (*common property*): Banyak orang miskin yang penghidupannya tergantung pada sumber daya milik umum. Sumber daya-sumber daya ini adalah sumber daya-sumber daya yang dibagi dan dikelola bersama oleh beberapa kelompok. Nilai dari beberapa sumber daya (satwa liar, lahan, hutan, ikan) semakin meningkat. Manfaat-manfaat yang terus bertambah dapat mendorong kelompok-kelompok yang berkuasa untuk memonopoli pemanfaatannya melalui hak-hak kepemilikan 'pribadi' dan seringkali 'menyingkirkan' orang lain dalam penggunaan sumber daya;
- Migrasi mengubah cara bagaimana masyarakat pedesaan dan penggunaan sumber daya diatur. Ketika orang-orang berpindah dari desa ke kota, tenaga kerja yang tersedia untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan berkurang. Hal ini mungkin memberikan menyebabkan penurunan kualitas dan nilai sumber daya (Warner, 2000). Migrasi ke areal pedesaan meningkatkan kebutuhan untuk pemanfaatan sumber daya dan dapat memberikan tantangan pada peraturan adat dalam hal pemerataan untuk akses pada sumber daya alam. Orang-orang baru mungkin tidak menjadi bagian

dari sistem-sistem adat setempat dalam hal kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya;

- Insentif-insentif yang bertentangan: Orang-orang memberikan tanggapan yang dapat diperkirakan bila mereka mendapatkan dorongan ekonomi untuk bertindak. Subsidi atau jaminan harga kopi membuat lebih banyak orang menanam kopi. Pajak yang tinggi atas satu jenis tanaman dapat membuat orang menanam tanaman yang lain. Insentif-insentif semacam ini kadang-kadang berhasil membantu pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Insentif-insentif semacam ini kadang-kadang berhasil membantu pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Jika tidak berjalan dengan semestinya, mereka disebut insentif-insentif yang "merugikan" (salah arah atau tidak beralasan). Beberapa insentif yang berlawanan dapat menyebabkan korupsi, sikap cari untung semata atau aji mumpung (*rent seeking*) dan menjadi sumber konflik lain (Ostrom, 1990), contohnya antara masyarakat pedesaan dan pegawai pemerintah.

### 4. Kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek pengelolaan sumber daya sebagai sumber-sumber konflik

Kebijakan-kebijakan baru mengenai desentralisasi, devolusi, dan pengelolaan kolaboratif yang baru memperbesar kekuatan dalam pengambilan keputusan dan pengaruh masyarakat lokal, rumahtangga-rumahtangga dan individu-individu. Kebijakan-kebijakan semacam itu mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi penghidupan mereka sendiri dan sumber daya-sumber daya di mana penghidupan mereka bergantung. Walaupun kebijakan-kebijakan seperti itu sangat menolong penghidupan yang berkelanjutan, keberhasilan pembagian kekuasaan yang lebih besar di antara kelompok-kelompok yang berbeda seringkali tidak berjalan dengan mulus. Kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek itu sendiri dapat menjadi sumber konflik, meskipun sebenarnya mereka dimaksudkan untuk mengurangi konflik atau memperbaiki penghidupan. Alasan-alasannya termasuk sebagai berikut (FAO, 2000):



- **Kebijakan-kebijakan ditentukan tanpa partisipasi setempat:**

Kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi sumber daya alam seringkali di-

buat tanpa partisipasi aktif masyarakat dan pengguna-pengguna sumber daya lokal. Contohnya, beberapa pemerintah mengandalkan strategi-strategi pengelolaan terpusat yang dikendalikan oleh unit-unit administrasi dan ahli-ahli teknik. Dalam hal ini, praktek-praktek dan hak-hak terkait dengan sumber daya alam lokal seringkali tidak diperhitungkan;

- **Identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan yang tidak tepat:**

Pemangku-pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam atau pengaruh atas suatu sumber daya. Contoh-contoh pemangku kepentingan adalah pemerintah lokal dan masyarakat. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini seringkali sangat beragam dan terdiri dari berbagai subkelompok. Mungkin tidak berguna untuk memperhitungkan suatu masyarakat sebagai satu kelompok, karena beberapa orang bisa memiliki kepentingan yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, tergantung dari jenis kelamin, status, umur, kekayaan, suku, dan lain-lain. Konflik dapat terjadi karena para perencana dan manajer tidak mengidentifikasi para pemangku kepentingan dengan baik atau gagal mengenal kepentingan suatu kelompok atas suatu sumber daya;

- **Perencanaan yang tidak terkoordinasi:** Banyak pemerintah dan badan-badan lain masih mengandalkan pendekatan sektoral dengan perencanaan dan koordinasi lintas-sektoral yang terbatas. Sebagai contoh, dinas pertanian memperkenalkan ekspansi tanaman budidaya di areal hutan tanpa menyadari pengaruh-pengaruh sebaliknya terhadap pengguna sumber daya lainnya. Tujuan-tujuan yang saling tumpang-tindih dan bersaing dapat membahayakan apabila badan-badan tersebut tidak mampu untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pemangku kepentingan lainnya;

- **Penyampaian informasi yang lemah atau tidak cukup:**

Penyampaian informasi yang efektif tentang kebijakan-kebijakan, hukum-hukum, prosedur-prosedur, dan tujuan-tujuan dapat meningkatkan keberhasilan program-program dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Sebaliknya, kurang

nya informasi tentang maksud-maksud dari badan-badan perencanaan dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan ketidakpercayaan;

- **Kapasitas institusi yang terbatas:** Konflik timbul ketika pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya kekurangan kapasitas untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya menghadapi keterbatasan keuangan untuk staf dan peralatan, tetapi mereka juga sering kekurangan keahlian untuk mengantisipasi konflik atau mengendalikan konflik yang timbul selama berlangsungnya aktivitas-aktivitas mereka;

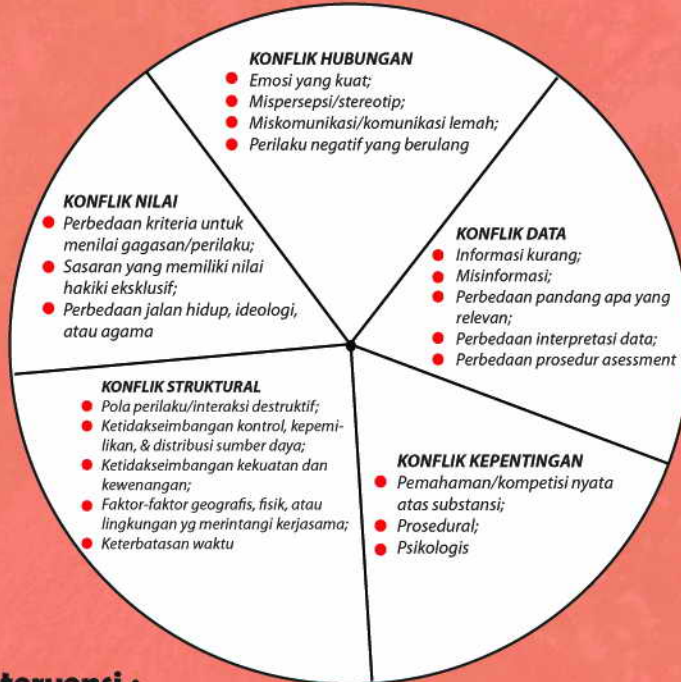


Proses mediasi penyelesaian konflik antara PT. Musim Mas dengan masyarakat Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan (Sumber: Scale Up)

- **Program-program pemantauan dan evaluasi yang tidak memadai:** Program-program dan prioritas-prioritas sering dirancang tanpa menetapkan dengan jelas komponen-komponen pemantauan dan penilaian, khususnya yang berhubungan dengan konflik sumber daya alam. Tidak adanya pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang sistematis, akan lebih menyulitkan identifikasi dan penyelesaian konflik;

- **Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk pengelolaan konflik:** Agar program-program pengelolaan sumber daya alam menjadi efektif, maka mekanisme-mekanisme untuk pengelolaan konflik secara partisipatif perlu dimasukkan ke dalam perencanaan dan implementasi program-program tersebut. Hal ini dapat menjamin bahwa konflik terbuka atau laten akan ditangani secara konstruktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik.

## JENIS KONFLIK BERDASARKAN SUMBER PENYEBAB



### Kemungkinan intervensi :

#### Konflik data

Ini antara lain dapat dilakukan dengan: Mencapai kesepakatan tentang data apa yang penting; Menyetujui tentang proses pengumpulan data; Mengembangkan kriteria bersama untuk menilai data; atau Menggunakan ahli dari pihak ketiga untuk mendapatkan opini dari luar atau memecahkan kemacetan.

#### Konflik kepentingan

Ini meliputi kegiatan seperti: Memfokuskan pada kepentingan, bukan posisi; Mencari kriteria yang obyektif; Mengembangkan solusi yang integratif yang memenuhi kebutuhan seluruh pihak; Mencari cara memperluas pilihan-pilihan atau sumber daya; Mengembangkan *trade-off* untuk memuaskan kepentingan yang berbeda secara kuat

#### Konflik hubungan antara manusia

Kemungkinan ini mencakup: Mengontrol ekspresi emosi melalui prosedur, aturan main bersama, pertemuan-pertemuan kecil dan sebagainya; Mengklarifikasi persepsi dan membangun persepsi yang positif; Memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi; Mencegah perilaku negatif yang berulang-ulang melalui perubahan struktur; Mendorong perilaku penyelesaian masalah secara positif

#### Konflik nilai

Menghindari pembatasan problem dalam istilah-istilah nilai; Mengijinkan para pihak untuk setuju dan tidak setuju; Menciptakan lingkungan yang mempengaruhi di mana satu perangkat nilai mendominasi; Mencari tujuan yang lebih tinggi yang seluruh pihak dapat berkontribusi

#### Konflik struktural

Memperjelas batasan dan peran perubahan; Menggantikan pola-pola perilaku destruktif; Mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol terhadap sumberdaya; Menetapkan proses pembuatan keputusan yang dapat diterima secara adil dan saling menguntungkan; Mengubah proses negosiasi dari tawar-menawar berdasarkan posisi pada berdasarkan kepentingan; Memodifikasi cara-cara mempengaruhi yang digunakan oleh para pihak (mengurangi kekerasan/pemaksaan, lebih persuasif); Mengubah hubungan fisik dan lingkungan para pihak (ketertutupan dan jarak); Memodifikasi tekanan-tekanan eksternal para pihak; Mengubah kendala-kendala waktu

#### Buletin Scale Up

Penanggung jawab : Ahmad Zazali

Penasehat : DR. Iwan Tjitradjaja, Gamal Pasya, Ph.D

Pemimpin Redaksi : Mu'ammam Hamidy

Tim Redaksi : Ahmad Zazali, Harry Oktavian, Mu'ammam Hamidy

#### Hubungi kami :

Jalan Ketitiran No. 26 Kel. Kampung Melayu

Sukajadi, Pekanbaru - Riau - Indonesia

Tel/Faks. +62-761-40028. Email : infoscaleup@yahoo.com

